

B-5

Volume 4, Nomor 2, Mei 2005

ISSN : 1412 - 1999

JSBP

Jurnal Sosial - Budaya dan Politik

Relevansi Demokrasi dan Perdamaian dalam
Perspektif Idealisme: Identifikasi Terhadap
Patologi Demokrasi
(Bagus Sigit Sunarko)

Quo Vadis Ideologi Gender
dalam Perkembangan Peradaban:
Evolusi Positif atautkah Kontra Produktif?
(Erni Agustini)

Permasalahan Pada Masa Remaja
dan Alternatif Pemecahannya
(Bambung Winarko)

Hegemoni Neoliberalisme dan
Memudarnya Wacana Ekonomi Alternatif di Indonesia
(Sunardi Purwoatmoko dan Agus Trihartono)

Aspek Politis Perjanjian Ekstradisi
Indonesia-Singapura
(Abubakur Eby Hara)

LKPM

Laboratorium Kajian Pemberdayaan Masyarakat

&

LKPK

Laboratorium Kajian Politik dan Kawasan

FISIP Universitas Jember

Jurnal Sosial-Budaya dan Politik

Ketua Penyunting	: Abubakar Eby Hara
Wakil Ketua Penyunting	: Akhmad Ganefo
Penyunting Pelaksana	: Agus Trihartono Budhy Santoso Himawan Bayu Patriadi Kris Hendrijanto M. Affandi Maulana Surya Kusumah Muhammad Iqbal Sunardi Purwoatmoko
Penyunting Ahli	: A. Latief Wiyata (<i>Universitas Jember</i>) Akhmad Khusyairi (<i>Universitas Jember</i>) Ayu Sutarto (<i>Universitas Jember</i>) Bustami Rahman (<i>Universitas Jember</i>) Hary Yuswadi (<i>Universitas Jember</i>) Heru Nugroho (<i>Universitas Gadjah Mada</i>) Huub de Jonge (<i>Nijmegen University</i>) Mohtar Mas'ood (<i>Universitas Gadjah Mada</i>) Robert Wessing (<i>Leiden University</i>) Setya Yuwana (<i>Universitas Negeri Surabaya</i>) Sunyoto Usman (<i>Universitas Gadjah Mada</i>)
Pelaksana TU	: Bagus Sigit Sunarko Hudan Ikhsan

Jurnal Sosial-Budaya dan Politik (JSBP) diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun sejak tahun 2001. Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 20 halaman, dengan format seperti tercantum dalam halaman kulit dalam-belakang (Persyaratan Naskah untuk JSBP). Naskah yang diterima penyunting, dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

Harga berlangganan (termasuk ongkos kirim) tiap tahun (dua kali penerbitan):	Alamat Penyunting dan Tata Usaha		
	Pulau Jawa	Luar Jawa	LKPM-LKPK FISIP Universitas Jember Jl.
Perseorangan	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Kalimantan, Kampus Tegal Boto, Jember
Lembaga	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	68131. Telp. & Fax. (0331) 335586 E-mail:
Mahasiswa	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	jsbp@eudoramail.com, ebyhara@yahoo.com

Biaya berlangganan dapat ditransfer ke Bank Mandiri No. Rekening: 1430001261997
atas nama Abubakar Eby Hara.

Jurnal Sosial-Budaya dan Politik

Daftar Isi

Relevansi Demokrasi dan Perdamaian dalam Perspektif Idealisme: Identifikasi Terhadap Patologi Demokrasi (Bagus Sigit Sunarko)	451-460
Quo Vadis Ideologi Gender dalam Perkembangan Peradaban: Evolusi Positif ataukah Kontra Produktif? (Erni Agustini)	461-471
Permasalahan Pada Masa Remaja dan Alternatif Pemecahannya (Bambang Winarko)	473-483
Hegemoni Neoliberalisme dan Memudarnya Wacana Ekonomi Alternatif di Indonesia (Sunardi Purwoatmoko dan Agus Trihartono)	485-508
Aspek Politis Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura (Abubakar Eby Hara)	509-514

Aspek Politis Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Oleh: Abubakar Eby Hara¹

Abstract: Many people blame Singapore for the failure to make an agreement with Indonesia on extradition law. However, in this paper, the author argues that part of the problem actually lay on Indonesian side. Some officials in the past did not want the agreement to come into reality because they were afraid that the extradited person would uncover some corruption case that might involved him or her in one or two cases of corruption. Another problem in Indonesian side was that the weak law enforcement in Indonesia itself. Weak law enforcement allows the corrupt businessmen to run away leaving this country. Therefore we now need a seriousness of both parties to pursue an agreement. We expect Indonesia can go on to enforce law and Singapore welcomes meetings and dialog to discuss extradition issues.

Keywords: hubungan Singapura-Indonesia, ekstradisi, penegakan hukum, korupsi dan pengusaha

I. Pendahuluan

Paper ini ditulis oleh seorang awam yang tidak tahu sama sekali tentang masalah ekstradisi. Panitia menghubungi penulis agaknya karena menginginkan ada wakil dari jurusan HI Univ Jember sebagai tuan rumah dan meminta pemrasaran untuk mengkaji aspek politis masalah ekstradisi. Namun tetap saja ini bukan bidang kajian yang

diketahui penulis dengan baik. Karena itu, kami mohon dimaklumi bahwa tulisan ini sangat lemah dengan fakta dan kelemahan-kelemahan lainnya.

Proses perundingan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dimulai pada awal tahun ini. Perundingan ini bisa berjalan setelah dipicu oleh kontradiksi panjang tentang

¹ Dosen Fisip Universitas Jember.

keinginan Indonesia agar beberapa pengusaha hitam Indonesia yang melarikan diri ke Singapura segera diekstradisi ke Indonesia dan keinginan Singapura agar para tersangka teroris di Indonesia diekstradisi ke Singapura. Tuntutan Singapura agar dilakukan ekstradisi tersangka pelaku terror itu telah menimbulkan protes di kalangan elit di Jakarta. Beberapa anggota DPR dan Menteri Kehakiman dan HAM waktu itu menuduh Singapura mau enaknya sendiri dengan meminta ekstradisi penjahat dari Indonesia namun melindungi para penjahat Indonesia yang bersembunyi di negara itu.

Dari berbagai berita dan tulisan, kita memperoleh kesan bahwa Singapura sengaja menunda perundingan perjanjian ekstradisi ini karena mereka memperoleh keuntungan dari larinya para konglomerat hitam ke negeri mereka. Para konglomerat itu yang umumnya adalah keturunan Cina membawa serta uang hasil usaha mereka dan menyimpannya di bank-bank Singapura. Mereka bebas berkeliaran di sana. Kalau dalam istilah terorisme, Indonesia dikenal sebagai *hub* dan *haven* untuk para teroris maka Singapura adalah *haven* atau pusat (*hub*) untuk para konglomerat hitam.

Kita juga dapat berspekulasi Singapura sengaja melindungi para konglomerat Cina ini karena sentimen kepentingan negeri mayoritas Cina itu untuk melindungi sesama orang perantau Cina di kawasan ini. Kita juga dapat berspekulasi bahwa negeri itu ternyata telah melecehkan Indonesia. Negeri itu ketika berhadapan dengan Indonesia tidak perlu menghargai

prinsip transparansi dan sikap anti korupsi, suatu kontras dengan citranya sebagai negeri yang bersih dan tidak korup di dunia internasional. Tidak mengherankan bahwa kesan demikian kemudian memunculkan komentar keras dari Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid ketika mereka berkuasa. Habibie misalnya mengecam Singapura sebagai republik pulau kecil seperti "tiny red dot on the map". Habibie menuduh Singapura sebagai negara rasis. Menurutnya, di Singapura orang Melayu tidak pernah bisa menjadi perwira. (Guerin 2004). Gus Dur, mengecam Singapura sebagai negara yang meremehkan etnis Melayu dan negara itu hanya ingin mendapat keuntungan dari tetangganya yang miskin (England 2000).

Namun sebuah kajian yang lebih dalam akan menunjukkan bahwa semua kesan dan spekulasi di atas perlu ditempatkan dalam proporsinya. Perilaku Singapura tentu saja dipengaruhi kepentingan domestik dari negara kecil itu untuk memperkuat kelangsungan hidupnya. Kita dapat berspekulasi tentang keuntungan ekonomi, rasisme, perlakuan tidak adil dan arogansi Singapura terhadap kepentingan tetangga. Tetapi itu semua mungkin terjadi karena kondisi-kondisi yang ada pada Indonesia juga. Kondisi itu sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut menyangkut kesiapan dan kondisi penegakan hukum di Indonesia sendiri.

2. Kepentingan Domestik Singapura

Sering disebutkan bahwa salah satu ciri hubungan antar bangsa adalah bahwa setiap negara adalah *selfish* yakni mengejar kepentingan dirinya sendiri

tanpa menghiraukan kepentingan negara lain. Namun belakangan ini asumsi itu dianggap bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya melainkan lahir melalui proses sosial tertentu. Bagi Singapura ciri itu agaknya berasal dari perjalanan historis yang pahit, kenyataan geografis dan kondisi demografis masyarakat.

Perjalanan historis itu berkaitan dengan kenyataan bahwa mereka harus berdiri sendiri dan terpisah dari Federasi Malaysia. Sebagai negara kecil tanpa sumber alam tentu saja sulit untuk membayangkan negara itu bisa *survive* tanpa suatu disiplin yang tinggi dan kerja keras. Apalagi sebagian besar penduduk Singapura adalah para perantau keturunan Cina yang terpisah jauh dari tempat asal usulnya. Penekanan pada keetnisan dan budaya Cina seringkali membuat para tetangga tersinggung dan membangkitkan sentimen anti Cina (Leifer 2000). Mereka terkepung oleh tetangga Melayu yang dominan di Asia Tenggara.

Tiga kondisi di atas: kenyataan historis, geografis dan demografis dengan piawai telah dijadikan bahan kampanye oleh para pemimpin Singapura untuk mendorong rakyat mereka mempertahankan negaranya yang kecil dan tidak punya sumber alam. Singapura harus mengkaji setiap peluang dan ancaman bagi negerinya secara serius dan mendetil agar tetap hidup. Para pemimpin ini mengatur sebuah sistem politik yang efisien dengan mencegah munculnya oposisi yang kuat. Rakyat diminta untuk konsentrasi pada bidang ekonomi, bersiap diri melawan kompetisi global, meningkatkan kemampuan

profesionalisme, dan menyediakan jasa yang kompetitif bagi pasar bebas internasional.

Untuk soal *survival* dalam bidang pertahanan dan keamanan mereka juga tidak kenal kompromi. Sudah sejak lama strategi pertahanan Singapura misalnya dirancang untuk melawan musuh paling dekat yang mengancamnya. Dua tetangga Melayu mereka yakni Indonesia dan Malaysia tentu saja adalah bagian dalam pemikiran strategis ancaman terhadap negara itu. Mereka tidak segan-segan untuk mencontoh model Israel dalam merancang pertahanan ini, dan mempunyai hubungan dekat dengan negara itu. Tanpa menghiraukan kecemasan tetangga yang mengecam pendudukan Israel di tanah Palestina, negeri itu suatu saat menerima kunjungan Presiden Israel ke Negara itu.

Negara ini memang bergabung dalam ASEAN, tetapi seperti semua negara ASEAN lainnya, mereka juga punya cita-cita dan kepentingan sendiri dalam bergabung dengan organisasi kawasan ini. Dalam ASEAN, eksistensinya walaupun sebagai sebuah negara kecil diakui sederajat dengan negara-negara yang lebih luas wilayah dan penduduknya. Mereka juga mempunyai kesempatan untuk mengajukan konsep mereka seperti kawasan dagang bebas untuk ASEAN yang jelas menguntungkan Singapura yang secara ekonomi lebih maju.

Singkatnya, kondisi-kondisi dan praktek politik di atas terus mengajarkan kepada negeri kecil seperti Singapura cara untuk *survive*. Mereka harus pandai memanfaatkan kesempatan yang ada

sekecil apapun, memaksimalkan kesempatan, berdisiplin, mencontoh negeri lain yang sama dalam pertahanan dan menunjukkan eksistensinya di kawasan. Bagi negara seperti Singapura, mewujudkan kepentingan dengan kekerasan senjata tentu saja bukan pilihan. Mereka tidak punya kemampuan untuk itu, mereka harus berdamai dengan lingkungan, satu-satunya pilihan yang tersedia adalah memanfaatkan setiap peluang sebaik mungkin. Itu lah budaya strategik yang berkembang dan dipilih Singapura.

Dalam konteks seperti itu, perjanjian ekstradisi juga bagi Singapura harus dilihat dari aspek apa keuntungannya untuk negeri itu. Walaupun kontribusi secara pasti secara ekonomis dari hadirnya konglomerat hitam di negeri itu belum diprediksi secara jelas, namun setidaknya negeri itu diuntungkan dengan datangnya para konglomerat yang menginvestasikan uang mereka di Singapura terutama di bidang perumahan yang mengangkat pasar rumah yang lemah (Burton 2005).

Kalau tidak ada tuntutan dan tekanan dari negara tetangga tentang pentingnya memulangkan para konglomerat itu, tentu mereka tidak merasa perlu terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Apalagi para konglomerat itu umumnya adalah etnis Cina yang mudah mendapatkan tempat di masyarakat bisnis dan politik negeri Singa itu.

3. Tuntutan Indonesia terhadap Perjanjian Ekstradisi

Satu hal perlu diingat bahwa Indonesia baru mulai secara giat dan serius

memulai tuntutan agar dilakukan perundingan perjanjian ekstradisi pada beberapa bulan terakhir setelah terjadi perubahan pemerintahan ke Susilo Bambang Yudhoyono, walaupun suara-suara tuntutan itu sudah ada sejak awal. Salah satu alasan mengapa sebelum ini tidak ada perundingan serius dengan Singapura kemungkinan besar adalah karena para konglomerat itu juga punya kaitan dengan para pejabat di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia juga tidak berhasil menjerat mereka selama mereka di Indonesia atau mereka sengaja dibiarkan untuk lolos demi melindungi tokoh-tokoh tertentu.

Hal ini misalnya terlihat dari komentar Singapura bahwa sebetulnya soal perjanjian ekstradisi adalah soal Indonesia sendiri. Pengamat hubungan internasional sebelum menjadi Menteri, Juwono Sudarsono pernah mengatakan Singapura enggan melakukan perjanjian ekstradisi karena persoalannya lebih banyak di Indonesia di mana waktu itu adanya keterlibatan aparat Indonesia sendiri dalam larinya para koruptor ke Singapura (*Tempo Interaktif*). Para aparat itu tidak mau semua kedok mereka terungkap. Di sini nampak bahwa pihak Singapura adalah pihak yang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam meningkatkan komitmen pelaksanaan hukum dalam negeri untuk memudahkan proses ekstradisi nantinya.

Perundingan tentang ekstradisi baru serius dilakukan dua negara bila ada kehendak kuat keduanya untuk berunding. Pemerintah Australia dan Indonesia misalnya serius merundingkan soal ekstradisi karena Australia sangat *concern* dengan soal imigran yang terus

berdatangan lewat Indonesia dan mengancam negara itu. Indonesia juga berkepentingan untuk membantu Australia mengatasi soal ini.

Dibandingkan dengan perjanjian dengan Australia dan Hong Kong, nampaknya pada waktu itu urgensi perundingan ekstradisi antara Indonesia belum lah kuat. Himbuan moral bahwa Singapura dapat menjaga citranya sebagai pemerintahan yang bersih dan anti korupsi agaknya tidak cukup kuat, karena toh yang korupsi bukan para pengusaha Singapura. Dunia internasional juga tidak menganggap itu cacat besar karena para konglomerat itu datang atas keinginan sendiri dan mereka lolos dari jeratan sistem hukum negara tetangga yang masih lemah.

Kini agaknya kedua pihak mulai serius untuk merundingkan soal ekstradisi ini, karena kondisinya makin matang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah bertemu dengan PM Singapura Lee Hsien Liong untuk merintis proses perjanjian ekstradisi pada awal tahun ini. Beberapa perundingan lanjutan kemudian dilakukan. Proses untuk mencapai perjanjian mungkin berlangsung lama, namun ini merupakan langkah penting untuk mengatasi persoalan ekstradisi kedua negara.

4. Kesimpulan: Urgensi Perjanjian Ekstradisi

Ada tiga alasan yang agaknya membuat perjanjian ekstradisi menjadi mendesak dan menuntut persetujuan segera. Pertama, pemerintah Indonesia makin serius untuk memberantas korupsi dan agaknya ingin menutup

berbagai celah yang menyebabkan para koruptor lolos. Saat ini misalnya ada beberapa koruptor yang kesulitan diadili karena lari ke Singapura, sebut lah misalnya Adrian Waworuntu, tersangka kunci skandal BNI sebesar Rp1.7 trillon (US\$190 million). Kemudian Maria Pauline Lumowa, warga Belanda kelahiran Indonsisa yang juga dikejar kepolisian Indonesia berada di Singapura. Beberapa tersangka penyalahgunaan dana BI seperti David Nusa Wijaya, juga berada di Singapura. Beberapa pengusaha juga pergi ke Singapura menyusul krisis ekonomi tahun 1997 dengan meninggalkan hutang ke pemerintah. (*Asia Times*, 13 Nopember 2004). Interpol saja tidak cukup untuk bisa membawa mereka pulang, tetapi diperlukan perjanjian ekstradisi.

Kedua, pada pihak lain pemerintah Singapura pun mulai terbuka dan memberi peluang bagi perundingan-perundingan berbagai aspek dalam ekstradisi. Mereka juga melihat kemungkinan untuk meminta ekstradisi para pelaku teror yang sangat ditakuti di negara itu. Walaupun tidak mendesak seperti dari pihak Indonesia, Singapura juga bisa menikmati hubungan yang lebih wajar dalam perdagangan yang selama ini menjadi kecaman tetangganya sebagai negara yang hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri dalam berdagang dengan negara tetangga. Adanya perjanjian secara luas juga memberi jaminan bagi kerjasama, terutama para investor Singapura yang masih ragu tentang kepastian hukum untuk berusaha.

Ketiga, perjanjian ekstradisi adalah bagian dari upaya lebih luas untuk

membangun perdagangan bebas yang fair antara kedua negara. Selain soal pelarian koruptor ke Singapura, selama ini negara dirugikan milyaran rupiah oleh para penyelundup pasir, kayu, timah, ikan dll ke Singapura. Karena kegiatan ini volume dagang yang resmi diidentifikasi sering berbeda antara catatan Indonesia dan Singapura. Penyelundupan orang dan obat bius yang makin marak juga akan diikutkan dalam list pernjanjian itu.

Namun semua kehendak yang baik ini tentu harus didukung dengan perbaikan dan kesiapan dari pihak Indonesia. Selama ini Singapura banyak diuntungkan oleh keadaan aturan hukum yang tidak dilaksanakan di Indonesia. Para penyelundup yang dilindungi oleh aparat, mudah lolosnya para koruptor ke luar negeri menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Bila ini dibenahi tentu saja kasus-kasus pelarian

modal dan penyelundupan akan semakin berkurang.

Daftar Pustaka

- Burton, John, 2005, 'Singapore hopeful on Indonesia extradition treaty', *Financial Times*, February 15.
- England, Vaudine, 2000, 'Singapore Greets Wahid Outburst with Silence', *South China Morning Post*, November 28.
- Guerin, Bill, 2004, 'Singapore, Indonesia Meet, Greet And Run', *Asia Times*, November 13.
- Leifer, Michael, 2000, *Singapore's Foreign Policy: Coping with Vulnerability*, London, New York: Routledge.